



KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KOLABORASI PENGENDALIAN INFLASI

Anindita Primastuti

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

anindita@ipdn.ac.id

Muhadam Labolo

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

muhadam@ipdn.ac.id

Ika Sartika

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ika_sartika@ipdn.ac.id

Bahrullah Akbar

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

bahrullah.akbar@ipdn.ac.id

Abstrak

Keterlibatan masyarakat dalam sebuah kolaborasi publik adalah sebuah keharusan, begitu juga dalam kolaborasi pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Cilacap yang sudah melibatkan masyarakat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun demikian keterlibatan masyarakat dirasakan masih kurang dan dianggap masih perlu melibatkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi pengendalian inflasi dan kelompok masyarakat yang dilibatkan. Dengan menggunakan metode triangulasi (triangulation method) dan triangulasi sumber data (data source triangulation) diketahui bahwa bentuk keterlibatan masyarakat ada yang aktif dan pasif, kemudian kelompok masyarakat yang paling banyak dilibatkan adalah petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam kolaborasi publik untuk mengendalikan inflasi adalah hal yang penting karena dapat mengoptimalkan capaian yang ingin dituju dari kolaborasi, dalam hal ini adalah terkendalinya inflasi. Tingkat keterlibatan masyarakat yang diinginkan dalam membuat keputusan (kebijakan) tergantung pada atribut masalah inti, beberapa masalah menuntut lebih banyak keterlibatan, yang lain menuntut lebih sedikit atau lebih banyak.

Kata Kunci: Masyarakat, Kolaborasi, Pengendalian Inflasi.

Abstract

Community involvement in a public collaboration is a must, as is collaboration with the Cilacap Regency Regional Inflation Control Team (TPID), which has involved the community represented by non-governmental organizations. However, community involvement is felt to be lacking and it is considered necessary to involve the community. This study aims to describe the forms of community involvement in inflation control collaboration and the community groups involved. By using the triangulation method and data source triangulation, it is known that there are active and passive forms of community involvement, then the most involved community groups are farmers. The results of this study indicate that the involvement of the public in public collaboration to control inflation is important because it can optimize the desired results of the collaboration, in this case, controlled inflation. The desired level of community involvement in decision making (policy) depends on the attributes of the core problem, some issues demand more involvement, others demand less or more.

Keywords: Community, Collaboration, Inflation Control.

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Inflasi adalah kondisi dimana harga-harga cenderung naik secara umum dan terus menerus.¹ maka akan mengakibatkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.^{2,3} Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan.⁴

Hal ini disebabkan karena inflasi dapat mengganggu stabilitas ekonomi sebuah negara. Terlebih jika inflasi yang dialami terjadi berlangsung secara berkepanjangan, ini akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun.

Menurut para ahli, inflasi dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaiberikut:^{5,6,7}

1. *Demand-Pull* (tarikan permintaan); semua sektor dalam perekonomian mencoba membeli lebih banyak barang dan jasa daripada yang dapat dihasilkan oleh ekonomi. Ketika konsumen, bisnis dan pemerintah bertemu di toko-toko, mereka menyebabkan kekurangan, yang menaikkan harga. Dengan demikian harga "ditarik" oleh permintaan yang berlebihan. Ini bisa terjadi misalnya jika konsumen memutuskan untuk menggunakan kartu kredit mereka dan berhutang untuk membeli barang-barang yang tidak mampu mereka beli. Penjelasan serupa menyalahkan inflasi pada pengeluaran berlebihan oleh pemerintah federal. Bagaimanapun, pemerintah meminjamkan kemudian menghabiskan miliaran dolar, sehingga memberikan tekanan pada harga. Berbeda dengan penjelasan tarikan permintaan, yang mengutip kelebihan permintaan pada semua sektor ekonomi, penjelasan ini hanya memegang pengeluaran defisit pemerintah yang bertanggung jawab atas inflasi.
2. *Cost-Push* (dorongan biaya); Penjelasan inflasi Cost-Push mengklaim bahwa kenaikan biaya input (biaya produksi), terutama energi dan tenaga kerja yang terorganisir, menaikkan biaya produk untuk produsen dan dengan demikian menyebabkan inflasi. Situasi ini mungkin terjadi, misalnya, ketika serikat nasional yang kuat memenangkan

¹ Mankiw, N. Gregory. "Macroeconomics Worth Publishers." (2002).

² Samsul, Samsul, Najamuddin Mara Hamid, dan Hotman Guba Nasution. "Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1.1 (2019): 16-28.

³ Fauzi, Kory Rahmat, Agus Salim, dan Doni Satria. "Eksplorasi Harga Bahan Pokok sebagai Indikator Dini Pengendalian Inflasi di Sumatera Barat." *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 12.1 (2023): 33-47.

⁴ Astiyah, Suseno Siti. "Inflasi Suseno Siti Astiyah." *Bank Indonesia* 22.22 (2010): 1-68.

⁵ Bispham, J. A. "100th Issue of the Review: The Nature of the Inflation Process." *National Institute Economic Review* 100 (1982): 8-13.

⁶ Phillips, A. W. "The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957." *Economica* 25 (1958): 283.

⁷ Jongwanich, Juthathip, dan Donghyun Park. "Inflation in developing Asia." *Journal of Asian economics* 20.5 (2009): 507-518.

kontrak upah yang besar, memaksa produsen menaikkan harga untuk memulihkan kenaikan biaya tenaga kerja. Penyebab lain dari inflasi yang didorong oleh biaya adalah kenaikan tiba-tiba harga minyak internasional, yang dapat menaikkan harga segalanya dari plastik dan tiket pesawat.

3. *Wage-price Spiral* (spiral upah-harga), Spiral harga-upah, penjelasan yang lebih netral tidak menyalahkan kelompok atau acara tertentu apa pun untuk mempengaruhi harga. Menurut pandangan ini, suatu spiral yang terus-menerus dapat dimulai ketika harga yang lebih tinggi memaksa pekerja untuk meminta upah yang lebih tinggi. Jika mereka mendapatkan upah yang lebih tinggi, produsen mencoba memulihkan biaya itu dengan harga yang lebih tinggi. Ketika masing-masing pihak mencoba untuk memperbaiki posisi relatifnya dengan peningkatan yang lebih besar dari sebelumnya, laju inflasi terus meningkat.
4. Pertumbuhan Moneter yang Berlebihan, penjelasan paling populer untuk inflasi adalah pertumbuhan moneter yang berlebihan. Ini terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dari PDB riil. Menurut pandangan ini, setiap uang ekstra atau kredit tambahan yang dibuat oleh sistem Federal Reserve akan meningkatkan daya beli seseorang. Ketika orang mengirim uang tambahan ini, mereka menyebabkan efek tarik-permintaan yang menaikkan harga.

Dari keempat penyebab inflasi di atas dapat dilihat bahwa banyak aktor yang terlibat didalamnya ada masyarakat sebagai konsumen dan sumber input, swasta sebagai produsen dan penyedia barang yang memiliki andil dalam mempermainkan harga dan juga pemerintah yang dalam siklus ekonomi bisa berperan sebagai regulator, produsen juga konsumen. Siklus ekonomi yang berputar melibatkan ketiga aktor tersebut dapat memicu inflasi, namun pemerintah sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan mengatur adalah yang paling menentukan dalam pengendalian inflasi.⁸

Melihat banyaknya hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dan dampaknya yang begitu luas maka untuk mengendalikan inflasi diperlukan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak bukan hanya melibatkan unsur pemerintahan namun juga sektor swasta, masyarakat, akademisi dan sebagainya karena pengendalian inflasi bukanlah suatu permasalahan mudah diselesaikan sendiri oleh pemerintah pusat.^{9,10}

⁸ Helbawanti, Octaviana, Wahyu Adhi Saputro, dan Amalia Nadifta Ulfa. "Pengaruh harga bahan pangan terhadap inflasi di Indonesia." *Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* 5.2 (2021): 107-116.

⁹ Kurniawati, Fitri. "Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6.2 (2019).

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi dan organisasi lainnya dalam penanganan suatu permasalahan dimungkinkan untuk dilakukan jika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja atau dikenal dengan konsep *Collaborative Public Management* (manajemen publik kolaboratif). Menurut Agranoff dan McGuire (2003) *Collaborative Management is a concept that describes the process of facilitating and operating in multi-organizational arrangements to solve problems that cannot be solved, or solved easily, by single organizations.*^{11,12}

Lebih lanjut Agranoff dan McGuire menyatakan bahwa kolaborasi dibentuk oleh pelbagai organisasi yang saling berhubungan dan memiliki tujuan tertentu. Kolaborasi didesain untuk mengatasi suatu permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh sebuah organisasi dengan mudah sehingga memerlukan proses fasilitasi dan operasionalisasi dalam pengaturan bersama (multi organisasi).^{13,14} Pengaturan bersama dapat juga diartikan sebagai perjanjian kerjasama yang seringkali bekerja lintas batas dengan melibatkan multi sektor dan multi aktor, dimana hubungan kolaborasi tersebut didasarkan atas nilai-nilai hubungan timbal balik. Sebagaimana dalam pengendalian inflasi yang memerlukan kolaborasi lintas level pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat nasional dengan melibatkan multi sektor dan multi aktor yang memiliki hubungan timbal balik.¹⁵

Oleh karena itu pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk mengendalikan inflasi dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).¹⁶

Kabupaten Cilacap memiliki angka inflasi paling tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

¹⁰ Alwandi, Mohammad Ammar, dan Dewi Putri Angraini. "Persistensi Inflasi di Sumatera dan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah." *Media Edukasi Data Ilmiah dan Analisis (MEDIAN)* 5.02 (2022): 1-10.

¹¹ Agranoff, Robert, dan Michael McGuire. *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press, 2003.

¹² Hamilton, Richard F. "American sociology rewrites its history." *Sociological Theory* 21.3 (2003): 281-297.

¹³ Triwahyuni, Triwahyuni. "Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6.2 (2021): 199-210.

¹⁴ Kamaludin Yusup, Deni, dkk. "Pengendalian Inflasi, Moneter, dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." <http://digilib.uinsgd.ac.id> 1.1 (2020): 1-10.

¹⁵ Triwahyuni, Triwahyuni. "Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6.2 (2021): 199-210.

¹⁶ Sumber: <http://tpin.id>, diakses pada 26 Maret 2023

Tabel 1. Tingkat Inflasi Berdasarkan IHK di 6 Kab/Kota SBH di Jawa Tengah (%)

Daerah	Tingkat Inflasi Per Tahun (%)					Rata-rata (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Jawa Tengah	3,71	2,82	2,81	1,56	1,70	2,52
Tegal	4,03	3,08	2,56	2,36	1,53	2,712
Semarang	3,64	2,76	2,93	1,49	1,49	2,462
Kudus	4,17	3,11	3,02	1,24	1,59	2,626
Cilacap	4,41	3,21	2,19	1,71	1,88	2,68
Purwokerto	3,91	2,98	2,28	1,9	2,18	2,65
Surakarta	3,1	2,45	2,94	1,38	2,58	2,49

Sumber: jateng.bps.go.id

BPS Provinsi Jawa Tengah selalu melakukan perhitungan inflasi dengan melakukan Survey Biaya Hidup (SBH) di enam Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah sebagai sampelnya. Keenam Kabupaten/Kota tersebut adalah Tegal, Semarang, Kudus, Cilacap, Purwokerto dan Surakarta. Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun angka inflasi di enam Kabupaten/Kota tersebut dalam rentang waktu lima tahun (2017 – 2021) namun kabupaten Cilacap ternyata memiliki nilai rata-rata inflasi yang paling tinggi.

Inflasi juga memiliki dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari sisi belanja daerah, kenaikan harga secara umum akan menyebabkan kenaikan anggaran belanja pemerintah sehingga APBD menjadi terbebani, artinya biaya (*cost*) yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah juga bertambah.^{17,18} Sebagai contoh, jika terjadi inflasi yang menyebabkan harga barang semakin mahal maka pemerintah daerah juga dituntut untuk menaikkan gaji pegawainya agar pegawainya tetap memiliki daya beli.

Untuk mengatasi inflasi di Kabupaten Cilacap, sesuai amanah pemerintah pusat Bupati Cilacap juga membentuk TPID Kabupaten Cilacap. TPID Kabupaten Cilacap merupakan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan elemen masyarakat yaitu LSM. Dalam bekerja TPID memiliki sebuah *roadmap* yang sudah ditentukan oleh TPIN, namun demikian bagaimana program/kegiatan dalam melaksanakan *roadmap* tersebut diserahkan kembali kepada TPID masing-masing. Selain program/kegiatan TPID juga melahirkan pelbagai kebijakan yang ditujukan untuk pengendalian angka inflasi di Kabupaten Cilacap.

¹⁷ Sari, Vivi Monica, Bambang Utoyo, dan Novita Tresiana. "Evaluasi Pengendalian Inflasi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 3.2 (2021): 113-126.

¹⁸ Yurianto, Yurianto. "Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta." *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal* 17.1 (2020): 12-33.

Pelibatan masyarakat dalam TPID Kabupaten Cilacap menunjukkan itikad baik pemerintah kabupaten Cilacap, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas (1993) yang mengatakan bahwa keterlibatan publik dapat meningkatkan efektivitas pemerintah dengan meningkatkan kecocokan program publik dengan kebutuhan warga, dengan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program, atau dengan mendorong bantuan warga dalam mengoperasikan program.¹⁹ Dengan melibatkan masyarakat diharapkan program/kegiatan TPID dalam rangka pengendalian inflasi telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cilacap.

Namun demikian keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi TPID dirasa masih sangat kurang. Terlebih saat proses pembuatan kebijakan, dimana prosesnya hanya melibatkan aparat pemerintah daerah. Kondisi di lapangan masyarakat hanya dilibatkan pada pelaksanaan program/kegiatan, hal inilah yang akan dilihat lebih jauh dalam penelitian ini.²⁰ Masyarakat sebagai kelompok individu yang sudah menempati suatu wilayah dan berinteraksi sehingga membentuk suatu budaya tersendiri²¹ jelas merupakan pihak yang paling tepat untuk dilibatkan dalam kolaborasi TPID jika ingin program pengendalian inflasi berjalan secara optimal. Penelitian ini akan mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam program/kegiatan TPID serta bagaimana tipe keterlibatan masyarakat, apakah cenderung aktif atau hanya bersifat pasif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi (*method triangulation*), dimana dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode yang berbeda untuk menganalisis fenomena yang sama.²² Triangulasi tipe ini acapkali digunakan pada penelitian kualitatif, metode pengumpulan datanya bisa terdiri dari tiga metode seperti wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur kepada para masyarakat, kemudian observasi dilakukan terhadap proses pelibatan masyarakat pada kegiatan TPID dan juga catatan lapangan (dokumentasi) terkait kegiatan/program TPID Kabupaten Cilacap.

Triangulasi pengumpulan data (*data source triangulation*) melibatkan pengumpulan data yang bersumber dari berbagai tipe orang yang berbeda, termasuk individu, kelompok, keluarga, komunitas dan sebagainya untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan data yang valid.²³ Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur kepada kelompok masyarakat yang memiliki

¹⁹ Thomas, John Clayton. "Public Involvement and Governmental Effectiveness: A Decision-Making Model for Public Managers." *Administration & Society* 24.4 (1993): 444-469.

²⁰ Kesimpulan ini berdasarkan hasil observasi pra penelitian di Kabupaten Cilacap.

²¹ Calhoun, Lawrence G., dan Richard G. Tedeschi. *Posttraumatic growth in clinical practice*. Routledge, 2013.

²² Polit, Denise F., dan Cheryl Tatano Beck. *Nursing research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Lippincott Williams & Wilkins, 2008.

²³ Calhoun, Lawrence G., dan Richard G. Tedeschi. *Posttraumatic growth in clinical practice*. Routledge, 2013.

latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Cilacap

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertugas melaksanakan berbagai kegiatan mengendalikan inflasi/stabilisasi harga di wilayahnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017. Kegiatan TPID dimaksud termasuk, namun tidak terbatas pada upaya-upaya yang sifatnya tindakan korektif. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya antisipatif juga diperlukan, mengingat sifat dari inflasi yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan-penawaran (*supply-demand*) konvensional. Berdasarkan Buku Panduan TPID tahun 2019 yang diterbitkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) disebutkan bahwa pelaksanaan tugas TPID meliputi: Koordinasi, Capacity Building, Laporan Triwulan, Evaluasi Kinerja dan memberikan Rekomendasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan.

TPID Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 500/679/06 Tahun 2019 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 500/445/06/Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Cilacap. Surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa Tim Pengendali Inflasi Kabupaten Cilacap berjumlah tiga puluh tiga (33) orang yang terdiri dari kolaborasi antara elemen pemerintah daerah, Bank Indonesia Cabang Purwokerto, BUMN, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dipimpin oleh Bupati Cilacap secara langsung.

Selanjutnya dalam surat keputusan tersebut diuraikan tugas dari TPID Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut: 1) Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota; 2) Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi; 3) Melakukan upaya untuk memperkuat system logistic pada tingkat kabupaten/kota; 4) Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; 5) Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota; dan 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Provinsi secara triwulan atau secara sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selain menyebutkan tentang uraian tugas, dalam surat keputusan tersebut juga disebutkan mekanisme kerja, mekanisme pengendalian dan pemantauan harga juga bentuk-bentuk pengendalian harga yang dapat dilakukan. Sekretariat TPID Kabupaten Cilacap

berkedudukan di Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Uraian tugas tersebut kemudian dibahas bersama oleh semua anggota TPID dan strategi TPID Kabupaten Cilacap dalam mengendalikan inflasi tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2020-2023, yang di dalamnya memuat empat kunci strategi yaitu; Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Empat kunci strategi itulah yang kemudian di *breakdown* menjadi program/kegiatan TPID Kabupaten Cilacap.

Keterlibatan Masyarakat dalam Kolaborasi Pengendalian Inflasi di Kabupaten Cilacap

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anggota TPID merupakan kolaborasi yang terdiri dari elemen, pemerintah, swasta dan LSM. Namun demikian keterwakilan masyarakat melalui LSM masih sangat kurang apalagi hanya dua LSM yang dilibatkan dalam kolaborasi TPID. Pelibatan masyarakat (*public participation*) dalam kolaborasi ini sangat penting karena selain alasan demokrasi, masyarakat adalah sasaran dari pengendalian inflasi dan inilah yang menjadi kunci utama dari manajemen publik kolaboratif.^{24,25} Oleh karena itu ketua TPID tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan terjebak dalam pertempuran politik semata jika tidak ingin kolaborasi yang terjalin terancam gagal.

Pada bagian proses ini juga sangat penting bagi pemerintah daerah/kepala daerah untuk dapat memahami persoalan yang terjadi di masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁶ Masyarakat pun sangat berharap pemerintah daerah mampu memberikan jawaban (solusi) atas persoalan-persoalan tersebut. Jika kepala daerah sebagai ketua TPID gagal untuk memahami persoalan dan tidak mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat maka akan menimbulkan rasa apatis kepada pemerintah daerah.

Melibatkan masyarakat dalam proses kolaborasi merupakan salah satu upaya untuk memahami persoalan dan menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Dengan demikian akan tercipta suatu konsensus antara masyarakat dan pemerintah daerah yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah program dan kebijakan. Masyarakat pun akan merasa melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh komitmen, bahkan membantu pemerintah mensukseskan program-program yang sudah dicanangkan karena kebijakan tersebut adalah hasil konsensus yang merupakan landasan bagi pencapaian bersama,²⁷ dalam hal ini adalah terkendalinyainflasi.

²⁴ Saiyed, Rahmah. "Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Jurnal Ilmiah Bongaya* 5.1 (2021): 42-49.

²⁵ Saiyed, Rahmah. "Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Jurnal Ilmiah Bongaya* 5.1 (2021): 42-49.

²⁶ Tulus, Tulus, Abdul Aziz Ahmad, dan Suharno Suharno. "Mengukur Efektifitas Program Pengendalian Inflasi pada Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri, Natal dan tahun baru) di kota tegal." *INOVASI* 16.1 (2020): 51-59.

²⁷ Labolo, Muhadam, dan Etin Indrayani. "Bureaucratic Reform and the Challenge of Good Governance Implementation in Indonesia." *International Journal of Kybernology* 3.2 (2019): 25-42.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti mewawancarai perwakilan masyarakat yang berjumlah 100 orang diluar anggota TPID Kabupaten Cilacap. Masyarakat yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda yaitu; petani (25 orang), pedagang (25 orang), karyawan swasta (25 orang) dan nelayan (25 orang). Keempat bidang pekerjaan tersebut dipilih keterwakilannya karena masyarakat Kabupaten Cilacap selain sebagai ASN paling banyak berkerja pada empat bidang tersebut. Selain itu ditanyakan juga kepada yang bersangkutan apakah mereka terlibat secara aktif atau pasif.

Berdasarkan hasil wawancara terstruktur, observasi dan catatan lapangan, selanjutnya dilakukan tabulasi terhadap jawaban responden sehingga diperoleh tabel berikut ini:

Tabel 2. Keterlibatan Masyarakat Pada Program Pengendalian Inflasi

NO	PROGRAM TPID	Keterlibatan Masyarakat (%)				Tipe Keterlibatan
		Petani	Pedagang	Pegawai Swasta	Nelayan	
1	Optimalisasi Pasar Murah komoditas bahan pangan strategis.	18	66	6	10	Aktif
2	Pengaturan pola tanam cabai di daerah sentra untuk mengantisipasi kelangkaan dan melimpahnya hasil panen cabai.	100	0	0	0	Aktif
3	Melaksanakan program lapak petani bersama	42	30	8	20	Aktif
4	Mengadopsi mekanisme Toko Tani Indonesia ke dalam program Toko TPID, serta memperbanyak jaringan TTI dan Rumah Pangan Kita	44	37	3	16	Pasif
5	Memberikan sosialisasi mengenai diversifikasi konsumsi bahan pangan melalui program one day no rice, program desa mandiri pangan, kawasan rumah pangan lestari.	32	38	15	15	Pasif
6	Program beras PNS di Purbalingga dan Cilacap.	0	0	0	0	Tidak ada

7	Peningkatan produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal)	100	0	0	0	Aktif
8	Optimalisasi bantuan sarana produksi.	42	40	4	14	Pasif
9	Pengembangan klaster komoditas volatile food: beras, bawang merah, bawang putih, cabai dan ayam kampung	73	20	2	5	Aktif
10	Pemanfaatan sistem resi gudang (SRG)	90	5	2	3	Pasif
11	Diseminasi dukungan pengembangan petani/gapoktan	100	0	0	0	Aktif
12	Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah	10	80	5	5	Pasif
13	Pembentukan BUMD pangan di Kabupaten Cilacap serta revitalisasi BUMD Pangan	70	0	0	30	Pasif
14	Revitalisasi pasar tradisional	20	60	5	15	Aktif
15	Pembangunan dan pemeliharaan waduk/embung sebagai solusi penyediaan airbagi pertanian	100	0	0	0	Aktif

Sumber: diolah penulis

Tabel diatas menunjukkan ada limabelas (15) Program TPID Kabupaten Cilacap, dimana program-program tersebut telah disesuaikan dengan Roadmap TPID. Dari program-program tersebut dapat dilihat bahwa tidak semuanya melibatkan masyarakat dari keempat bidang pekerjaan tersebut, yaitu pada program beras PNS dimana pada program ini PNS diberikan tunjangan untuk membeli beras, sehingga tidak ada kaitannya dengan kelompok masyarakat lainnya.

Sementara dari keseluruhan program TPID yang paling banyak dilibatkan adalah kelompok petani, hal ini dikarenakan TPID fokus pada pengendalian inflasi pangan. Inflasi pangan yang tidak terkendali dianggap dapat memicu inflasi pada barang/jasa lainnya.²⁸ Oleh

²⁸ Rizal, Derry Ahmad, dan Moh Syaiful Bahri. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Karl Marx dan Max Weber." *Mawa Izh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 13.02 (2022): 189-209.

karena ini petani sebagai salah satu produsen dari bahan pangan menjadi bagian penting bagi pengendalian inflasi.

Program TPID yang melibatkan masyarakat secara aktif antara lain: Optimalisasi Pasar Murah komoditas bahan pangan strategis; Pengaturan pola tanam cabai di daerah sentra untuk mengantisipasi kelangkaan dan melimpahnya hasil panen cabai; Melaksanakan program lapak petani bersama; Peningkatan produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal); Pengembangan kluster komoditas volatile food; Diseminasi dukungan pengembangan petani/gapoktan; Revitalisasi pasar tradisional; Pembangunan dan pemeliharaan waduk/embung sebagai solusi penyediaan air bagi pertanian.²⁹

Pelibatan masyarakat secara aktif yang dimaksud adalah bahwa masyarakat yang dilibatkan turut berperan aktif dalam program yang sedang berjalan. Misalkan pada program optimalisasi pasar murah komoditas pangan strategis, dimana keterlibatan petani sebanyak 18%, pedagang sebanyak 66%, pegawai swasta 6% dan nelayan 10%. Pada program ini petani dan nelayan aktif sebagai produsen bahan pangan, pedagang aktif memasarkan bahan pangan tersebut dan pegawai swasta turut mempromosikan produk-produk dari nelayan dan petani. Pedagang memegang peranan penting pada program ini oleh karenanya jumlah pedagang yang dilibatkan cukup tinggi.

Pelibatan masyarakat secara aktif yang hanya ditujukan bagi para petani pun ada. Contohnya adalah: program pengaturan pola tanam cabai di daerah sentra untuk mengantisipasi kelangkaan dan melimpahnya hasil panen cabai; Peningkatan produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal); Pembangunan dan pemeliharaan waduk/embung sebagai solusi penyediaan air bagi pertanian. Ketiga program ini 100% hanya melibatkan petani, karena memang sasarannya adalah meningkatnya produksi pertanian.

Selain dilibatkan secara aktif, bentuk pelibatan masyarakat ada juga yang secara pasif. Pasif dalam artian disini adalah meskipun dilibatkan namun hanya sebagai penerima program, masyarakat tidak diikutkan dalam proses operasionalnya. Pelibatan masyarakat secara pasif terdapat pada program: Mengadopsi mekanisme Toko Tani Indonesia ke dalam program Toko TPID; Memberikan sosialisasi mengenai diversifikasi konsumsi bahan pangan melalui program *one day no rice*, program desa mandiri pangan, kawasan rumah pangan lestari; Optimalisasi bantuan sarana produksi; Pemanfaatan sistem resi gudang (SRG); Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah; Pembentukan BUMD pangan di Kabupaten Cilacap serta revitalisasi BUMD Pangan. Jika diperhatikan

²⁹ Rositawati, Ayu Febriana Dwi, dan Halumma Zulfia Fitri. "Pengendalian Inflasi melalui Hasil Pemodelan Faktor yang Berpengaruh terhadap Inflasi Menggunakan Metode Regresi Robust Time Series Estimasi-S dan Estimasi-MM." *Government and Statistics* 1.1 (2022): 13-28.

program-program tersebut hanya berupa sosialisasi, pengarahan atau penyuluhan, sehingga masyarakat memang hanya diminta untuk datang menghadiri program-program tersebut.

Penyuluhan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting, beberapa diantaranya adalah:^{30,31} a) Memberdayakan masyarakat terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia; b) Mendorong peran dan keterlibatan penduduk dalam kegiatan pembangunan; dan c) Mendukung pemerintah dalam merencanakan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah meskipun keterlibatannya secara pasif merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, karena tujuan dari program pemerintah memang untuk kesejahteraan masyarakat.

Program pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, masih melibatkan masyarakat secara pasif. Kedepannya program ini perlu melibatkan masyarakat secara aktif karena semua kelompok masyarakat memerlukan pengetahuan terkait pengembangan model bisnis kerja yang bersifat lintas daerah. Karena dengan memahami dan mempraktekkan model bisnis Kerjasama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.^{32,33}

Meskipun sudah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam program-program TPID namun harus diakui bahwa masyarakat yang dilibatkan masih belum terlalu banyak dan skala programnya pun belum terlalu luas. Pelibatan masyarakat dalam program TPID terkendala oleh beberapa hal seperti: a) Kurangnya Pendanaan. Kabupaten Cilacap memiliki anggaran (APBD) yang terbatas sehingga program yang dicanangkan belum mampu melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian sudah ada upaya dari Pemda setempat untuk melaksanakan program secara bertahap sampai semua masyarakat bisa terlibat; b) Penolakan dari masyarakat. Beberapa program yang sudah dibuat oleh TPID Kabupaten Cilacap mendapat respon kurang baik dari masyarakat dengan berbagai alasan. Misalnya seperti sistem resi Gudang, dimana tidak semua petani mau atau siap melaksanakan hal tersebut meski sudah diberikan penyuluhan. Ada juga masyarakat yang tidak menghadiri penyuluhan karena harus bekerja; dan c) Program yang tidak berkesinambungan. Beberapa program TPID ada yang hanya berlaku satu tahun dan tidak

³⁰ Maryani, Dedeh. Nainggolan, Ruth Roselin. *Pemberdayaan Masyarakat*. (2022). Deepublish. Yogyakarta.

³¹ Hidayat, Adrian. "Pengendalian Inflasi Akan Membantu Selamatkan Daya Beli Masyarakat." *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 21.1 (2023): 152-157.

³² Rusanti, Ega, A. Syathir Sofyan, dan Nurfiyah Anwar. "Instrumen Studi Komparatif Kebijakan Moneter Konvensional dan Islam dalam Pengendalian Inflasi." *Jurnal Asy-Syarikhah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.2 (2020): 1-10.

³³ Rafiq, Muh Izwar, Badaruddin Badaruddin, dan Reynilda Reynilda. "Pengaruh Komunikasi, Insentif Daerah dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022." *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI)* 2.2 (2023): 140-152.

berkelanjutan disebabkan karena anggaran yang dipotong dan atau dialihkan ke program lainnya. Hal ini berdampak pada pelibatan masyarakat yang tidak menyeluruh.

Hasil temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat baru dilibatkan pada program/kegiatan TPID namun tidak pada saat pembuatan kebijakan. Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam TPID pun tidak selalu dilibatkan pada rapat-rapat perumusan kebijakan. Hal ini dilakukan secara intern oleh pihak Pemerintah Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu beberapa kebijakan yang dibuat dirasakan masyarakat kurang tepat sasaran (sebagian) karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini akan berdampak pada suksesnya program dan kegiatan dari TPID.

KESIMPULAN

Pelibatan masyarakat dalam kolaborasi publik untuk mengendalikan inflasi adalah hal yang penting karena dapat mengoptimalkan capaian yang ingin dituju dari kolaborasi, dalam hal ini adalah terkendalinya inflasi. Tingkat keterlibatan masyarakat yang diinginkan dalam membuat keputusan (kebijakan) tergantung pada atribut masalah inti, beberapa masalah menuntut lebih banyak keterlibatan, yang lain menuntut lebih sedikit atau lebih banyak. Dalam kasus TPID Kabupaten Cilacap memilih melibatkan masyarakat hanya pada tataran pelaksanaan program/kegiatan, tidak dalam tataran perumusan kebijakan. Melibatkan masyarakat melalui mekanisme apapun juga baik secara aktif maupun pasif membutuhkan keterampilan proses antar pribadi dan kelompok. Proses awal yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Hal ini penting karena bagian dari penyamaan persepsi sebelum masyarakat dilibatkan secara lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, Robert, dan Michael McGuire. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press, 2003.
- Alwandi, Mohammad Ammar, dan Dewi Putri Angraini. "Persistensi Inflasi di Sumatera dan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah." *Media Edukasi Data Ilmiah dan Analisis (MEDIAN)* 5.02 (2022): 1-10.
- Astiyah, Suseno Siti. "Inflasi Suseno Siti Astiyah." *Bank Indonesia* 22.22 (2010): 1-68.
- Bispham, J. A. "100th Issue of the Review: The Nature of the Inflation Process." *National Institute Economic Review* 100 (1982): 8-13.
- Calhoun, Lawrence G., dan Richard G. Tedeschi. *Posttraumatic Growth in Clinical Practice*. Routledge, 2013.
- Fauzi, Kory Rahmat, Agus Salim, dan Doni Satria. "Eksplorasi Harga Bahan Pokok sebagai Indikator Dini Pengendalian Inflasi di Sumatera Barat." *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 12.1 (2023): 33-47.

- Hamilton, Richard F. "American Sociology Rewrites Its History." *Sociological Theory* 21.3 (2003): 281-297.
- Helbawanti, Octaviana, Wahyu Adhi Saputro, dan Amalia Nadifta Ulfa. "Pengaruh harga bahan pangan terhadap inflasi di Indonesia." *Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* 5.2 (2021): 107-116.
- Hidayat, Adrian. "Pengendalian Inflasi Akan Membantu Selamatkan Daya Beli Masyarakat." *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 21.1 (2023): 152-157.
- Jongwanich, Juthathip, dan Donghyun Park. "Inflation in Developing Asia." *Journal of Asian Economics* 20.5 (2009): 507-518.
- Kamaludin Yusup, Deni, dkk. "Pengendalian Inflasi, Moneter, dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." <http://digilib.uinsgd.ac.id> 1.1 (2020): 1-10.
- Kurniawati, Fitri. "Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6.2 (2019).
- Labolo, Muhadam, dan Etin Indrayani. "Bureaucratic Reform and the Challenge of Good Governance Implementation in Indonesia." *International Journal of Kybernology* 3.2 (2019): 25-42.
- Mankiw, N. Gregory. "Macroeconomics Worth Publishers." (2002).
- Phillips, A. W. "The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957." *Economica* 25 (1958): 283.
- Polit, Denise F., dan Cheryl Tatano Beck. *Nursing research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
- Rafiq, Muh Izwar, Badaruddin Badaruddin, dan Reynilda Reynilda. "Pengaruh Komunikasi, Insentif Daerah dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022." *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI)* 2.2 (2023): 140-152.
- Rizal, Derry Ahmad, dan Moh Syaiful Bahri. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Karl Marx dan Max Weber." *Mawa Izh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 13.02 (2022): 189-209.
- Rositawati, Ayu Febriana Dwi, dan Halumma Zulfia Fitri. "Pengendalian Inflasi melalui Hasil Pemodelan Faktor yang Berpengaruh terhadap Inflasi Menggunakan Metode Regresi Robust Time Series Estimasi-S dan Estimasi-MM." *Government and Statistics* 1.1 (2022): 13-28.
- Rusanti, Ega, A. Syathir Sofyan, dan Nurfiyah Anwar. "Instrumen Studi Komparatif Kebijakan Moneter Konvensional dan Islam dalam Pengendalian Inflasi." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.2 (2020): 1-10.
- Saiyed, Rahmah. "Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Jurnal Ilmiah Bongaya* 5.1 (2021): 42-49.
- Samsul, Samsul, Najamuddin Mara Hamid, dan Hotman Guba Nasution. "Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1.1 (2019): 16-28.
- Sari, Vivi Monica, Bambang Utoyo, dan Novita Tresiana. "Evaluasi Pengendalian Inflasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2018." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 3.2 (2021): 113-126.
- Thomas, John Clayton. "Public Involvement and Governmental Effectiveness: A Decision-Making Model for Public Managers." *Administration & Society* 24.4 (1993): 444-469.

Anindita Primastuti, Muhadam Labolo, Ika Sartika, Bahrullah Akbar: Keterlibatan Masyarakat dalam Kolaborasi Pengendalian Inflasi

Triwahyuni, Triwahyuni. "Pengendalian Inflasi, Moneter, dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6.2 (2021): 199-210.

Tulus, Tulus, Abdul Aziz Ahmad, dan Suharno Suharno. "Mengukur Efektifitas Program Pengendalian Inflasi pada Hari Besar Keagamaan (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru) di Kota Tegal." *INOVASI* 16.1 (2020): 51-59.

Yurianto, Yurianto. "Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta." *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal* 17.1 (2020): 12-33.